



# JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

Nama Penulis: Syahri, Supardi

## KAPASITAS KELEMBAGAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN OGAN KEMORING ULU

Oleh:

Syahri<sup>1</sup>, \*Supardi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>FISIP Universitas Tamansiswa Palembang

<sup>2</sup>FISIP Universitas Tamansiswa Palembang

### ABSTRAK

Penelitian dan pengembangan berfungsi mendukung penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah. Utamanya menyediakan data dan informasi untuk pengambilan kebijakan dan strategi yang tepat, efektif dan efisien. Untuk memperoleh hasil penelitian dan pengembangan yang berkualitas, dibutuhkan adanya kapasitas kelembagaan litbang yang kredibel dan responsif. Penelitian ini menganalisis kapasitas litbang di Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Aspek penelitian difokuskan pada; regulasi, kelembagaan, sumberdaya, dan jaringan kemitraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan litbang di Kabupaten OKU cukup baik jika dilihat dari kelembagaan, dukungan sumber pendanaan dan legitimasi perlunya litbang. Sementara itu, kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan hasil litbang oleh stakeholder dan jaringan kemitraan dengan lembaga lain masih kurang.

**Kata Kunci: Kapasitas, Kelembagaan, Penelitian dan Pengembangan.**

### ABSTRACT

Research and development functions to support the local Government. Mainly providing data and information for making appropriate, effective and efficient policies and strategies. To obtain quality research and development results, it is necessary to have a credible and responsive R&D institutional capacity. This study analyzes the R&D capacity of the Government of Ogan Komering Ulu Regency. The research method used is descriptive qualitative. The research aspect is focused on; regulations, institutions, resources, and partnership networks. The results showed that the institutional capacity of R&D in OKU Regency was quite good when viewed from the institutional point of view, the support of funding sources and the legitimacy of the need for R&D. Meanwhile, the capacity of human resources, utilization of R&D results by stakeholders and partnership networks with other institutions is still lacking.

**Key Word: Capacity, Institution, Research and Development.**

<sup>1</sup> Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Tamansiswa Palembang.

<sup>2</sup> Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Tamansiswa Palembang.

# JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

Nama Penulis: Syahri, Supardi

## A. Latar Belakang

Penelitian dan pengembangan (litbang) merupakan salah satu bidang penting dalam pemerintahan, termasuk Pemerintah Daerah. Peran utamanya adalah penyediaan berbagai informasi dan data berdasarkan hasil kajian, analisis dan studi yang mendalam dan komprehensif atas berbagai fenomena dan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah.<sup>3</sup> Selain itu, berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan dapat dikembangkan berbagai inovasi dalam melakukan perekayasa sosial maupun fisik untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>4</sup>

Secara kelembagaan, fungsi penelitian dan pengembangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) dilakukan oleh Bagian Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Daerah (Bappeda). Tugas pokok dan fungsi yang diemban adalah menyelenggarakan kelitbang serta administrasi dan manajemen bidang litbang dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.<sup>5</sup>

Konsep pengembangan kapasitas kelembagaan pada dasarnya memiliki makna dan cakupan yang sangat luas berkaitan dengan masalah organisasi

atau kelembagaan.<sup>6</sup> Eade (1997) dalam Nugraha (2004) memberikan identifikasi, paling tidak ada 3 (tiga) komponen besar yang terkait, yaitu; (1) penguatan organisasi dan manajemen, (2) penyediaan sumberdaya, sarana dan prasarana, dan (3) pengembangan jaringan (*linkage*). Selain ketiga komponen tersebut, pengembangan kapasitas juga mencakup semua level organisasi atau lembaga. Dengan demikian, makna kapasitas kelembagaan pada dasarnya sangat terkait dengan seberapa besar kemampuan (*ability*) sebuah organisasi atau lembaga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehingga tercapai tujuan secara efektif, efisien dan berkelanjutan.<sup>7</sup>

## B. Rumusan Masalah

Berbagai persoalan yang dihadapi oleh Bagian Litbang Bappeda OKU adalah sebagai berikut;

- a. Kewenangan apa yang diperoleh Penelitian dan pengembangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU)?

---

<sup>3</sup> Heriyandi Roni, *Litbang dan Peranannya Terhadap Daerah*, <https://litbang.kemendagri.go.id/website/litbang-dan-peranannya-terhadap-daerah/>

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> <https://bapelitbangda.okukab.go.id/>

<sup>6</sup> Bambang Irawan, 2016, *Kapasitas Organisasi dan Pelayanan Publik*, Jakarta: Publika Press, hlm.1.

<sup>7</sup> Eade, D., 1998, *Capacity Building: an approach to People Centered Development* Oxford UK, Oxfam GB, hlm. 57.

# JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

Nama Penulis: Syahri, Supardi

- b. Kegiatan apa yang menjadi prioritas Penelitian dan pengembangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU)?
- c. Kendala apakah yang dialami Penelitian dan pengembangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU)?

## C. Pembahasan

### 1. Kewenangan yang Diperoleh Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU)

Kelahiran Badan Litbang Kabupaten OKU merupakan tindak lanjut atau implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. Sebelum kelahirannya, tugas dan fungsi litbang menjadi kewenangan dan tanggungjawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yakni Bidang Litbang. Hal ini menunjukkan bahwa

Pemerintah Kabupaten OKU progresif dan mengapresiasi terhadap perkembangan lptek yang ada.

Sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah, maka Badan Litbang dituntut memiliki kreativitas, inovasi dan mampu bersinergi serta berkoordinasi dengan SKPD lainnya maupun berbagai pihak yang menjadi *stakeholder* pemerintah daerah.<sup>8</sup>

Payung kebijakan penyeleggaraan litbang di daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2007 yang ditegaskan dalam pasal 2 bahwa ruang lingkup litbang meliputi (a) kebijakan umum, dan (b) pemerintahan daerah.<sup>9</sup> Selain itu juga Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri No. 36 Tahun 2012 dan Menteri Negara Riset dan Toknologi Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.

Kewenangan penyelenggaraan litbang berada di Badan Litbang. Kewenangan diberikan kepada pejabat struktural dan pejabat fungsional peneliti. Pejabat struktural memiliki kewenangan yang bersifat manajerial, sedangkan pejabat fungsional peneliti

<sup>8</sup> Mahfud, Ali Zuhri, *Peran dan Koordinasi Stakeholder dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, Malang*: Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 3, No. 12, Hal. 197.

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

# JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

Nama Penulis: Syahri, Supardi

bersifat teknis pelaksanaan litbang. Kewenangan manajerial meliputi:<sup>10</sup>

- a. Penyusunan rencana kerja litbang dan penyusunan rencana kerja tahun berikutnya
- b. Mengkoordinir penyelenggaraan kegiatan litbang
- c. Pengelolaan anggaran litbang
- d. Monitoring dan evaluasi kegiatan litbang
- e. Menetapkan tim peneliti dan surveyor
- f. Pemanfaatan hasil litbang

Kewenangan teknis pelaksanaan litbang meliputi; (1) Penyusunan kerangka acuan litbang, (2) Penyusunan dan pemaparan disain dan instrument litbang, (3) Pengumpulan dan pengolahan data, (4) Penyusunan laporan data lapangan, (5) Penyusunan laporan hasil litbang, dan (6) Pemaparan hasil litbang.<sup>11</sup>

## 2. Kegiatan yang Menjadi Prioritas Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU)

Pelaksanaan litbang di lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara swakelola (pasal 6). Pelaksanaannya direncanakan, dikerjakan dan diawasi langsung oleh

pengelola kegiatan litbang. Jika sumberdaya peneliti belum memadai, maka pelibatan pihak ketiga yang memiliki kompetensi bidang litbang dimungkinkan (pasal 7).<sup>12</sup> Pelibatan ini bertujuan untuk peningkatan sumberdaya manusia dan alih teknologi.

Badan litbang secara proaktif berkoordinasi dengan lembaga-lembaga litbang (pasal 11). Koordinasi dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan hasil litbang. Sumber pembiayaan litbang dapat berasal dari APBN, APBD dan sumber lain yang sah. Untuk meningkatkan kegiatan litbang yang aktual dan berkualitas Pemerintah Daerah mengalokasikan dana sekurang-kurangnya 1% dari APBD (pasal 17).

Idealnya perumusan visi dan misi lembaga melibatkan semua staf. Hal ini penting karena dengan keterlibatan sejak awal, maka staf telah memahami tentang arah dan tujuan yang hendak dicapai lembaga. Penilaian staf tentang keterlibatan perumusan visi dan misi lembaga masih dinilai kurang dilibatkan (71%). Hanya sebagian kecil (29%) dilibatkan dalam perumusan visi dan misi lembaga.<sup>13</sup> Meskipun kurang

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Ahmad Calam dan Amnah Qurniati, 2016, *Merumuskan Visi dan Misi Lembaga Pendidikan*, Bengkulu: Jurnal SAINTIKOM Vol.15, No. 1, Januari 2016, hlm. 59.

# JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

Nama Penulis: Syahri, Supardi

dilibatkan, tetapi lembaga dan pimpinan terus-menerus berusaha mensosialisasikan visi dan misi yang telah dirumuskan, seperti melalui rapat dan koordinasi lembaga.<sup>14</sup>

Struktur Badan Litbang masih menggunakan pola minimal, jika mengacu PP Nomor 41 Tahun 2007. Idealnya lembaga teknis berbentuk badan terdiri dari satu sekretariat dan paling banyak terdiri dari empat bidang. Sekretariat terdiri dari tiga subbagian, sedangkan bidang, masing-masing terdiri dari dua subbidang atau kelompok jabatan fungsional (Pasal 30 ayat 2).<sup>15</sup> Dengan demikian, untuk pengembangan struktur dimasa yang akan datang masih sangat memungkinkan.

### **3. Kendala apakah yang dialami Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU)**

Badan Litbang saat ini belum memiliki sumberdaya peneliti. Sumberdaya aparatur pada posisi jabatan dan staf struktural. Sebagian besar berpendidikan sarjana (S1) beberapa staf Pascasarjana (S2). Dengan pendidikan demikian potensial dikembangkan menjadi staf peneliti.

Sebelum di Badan Litbang, mereka berasal dari berbagai SKPD lain.

Sarana dan prasarana yang tersedia sangat terbatas, kurang mendukung kegiatan litbang. Hasil penilaian (93%). Ketersediaan teknologi informasi juga kurang mendukung (79%). Web site lembaga belum ada dan software pengolah data juga belum tersedia. Apalagi ketersediaan perpustakaan dan laboratorium.

Kepemimpinan dipersepsi oleh staf tergolong cukup memiliki komitmen terhadap pengembangan litbang. Hal ini terindikasi dengan adanya upaya yang terus menerus melakukan perbaikan dan pengadaan sarana dan prasarana kantor maupun membangun kerjasama dengan berbagai pihak. Koordinasi internal dilakukan secara berkala dan cukup memiliki respon yang cepat untuk mengambil langkah-langkah kegiatan litbang. Dalam hal proses pengambilan keputusan dilakukan dengan melibatkan kelompok staf tertentu.

Keluaran kegiatan Badan litbang secara internal melayani SKPD dan Instansi terkait berkaitan dengan berbagai data dan informasi, serta kajian terhadap masalah tertentu.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyelenggaraan

Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

# JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

Nama Penulis: Syahri, Supardi

Secara eksternal melayani pelaku penelitian di Kabupaten OKU, antara lain para mahasiswa, dosen, peneliti, surveyor yang memerlukan perizinan penelitian atau rekomendasi.

Kerjasama dan jaringan masih terbatas dan dilakukan insidental. Kerjasama dengan perusahaan hingga saat ini belum dilakukan. Jaringan Penelitian dan Pengembangan Daerah telah terbentuk tetapi belum berjalan sesuai yang diharapkan.

Persepsi dan penilaian stakeholders terhadap litbang positif. Mereka berharap Badan Litbang menjadi “dapur” (pemikir) rumusan kebiakan dan pembangunan daerah yang terpercaya.

## 4. Penutup

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik sejumlah kesimpulan sebagai berikut;

- Visi dan misi telah dirumuskan tertulis di Rencana Strategis. Sebagian besar staf telah tahu, tetapi tingkat pemahaman terhadap makna dan orientasi visi dan misi kurang.
- Struktur organisasi memungkinkan dikembangkan, terutama untuk jabatan fungsional peneliti.
- Sumberdaya aparatur untuk peneliti sangat lemah. Belum ada jabatan fungsional peneliti.

- Keluaran kegiatan *soft science* dan *hard science* belum jelas pemanfaatannya oleh stakeholder, khususnya SKPD lainnya.
- Sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Litbang sangat terbatas. Belum mendukung secara optimal untuk kegiatan litbang daerah.
- Persepsi stakeholders positif terhadap keberadaan Badan litbang. Jejaring yang ada masih terbatas.

### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dirumuskan, maka sejumlah saran yang dapat diberikan sebagai berikut;

- Pengembangan struktur sebaiknya diprioritaskan pada pengisian jabatan fungsional peneliti daripada penambahan bidang dan subbidang. Lembaga litbang kekuatan utamanya terletak pada kemampuan penelitian yang keluarannya rekomendasi kebijakan dan inovasi teknologi yang dimanfaatkan pemerintah daerah dan dunia usaha.
- Pengisian jabatan peneliti dengan merekrut PNS baru akan sulit dan waktu yang panjang. Pilihan yang dapat dilakukan adalah mengembangkan staf yang ada menjadi staf peneliti pada setiap bidang atau menerima mutasi PNS dari SKPD lain untuk menjadi staf peneliti.



## JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

Nama Penulis: Syahri, Supardi

- c. Agar hasil litbang lebih memberi kemanfaatan bagi pemerintah daerah dan *stakeholder*, maka kegiatan litbang harus seiring dan sejalan dengan isu-isu strategis daerah, RPJMD dan RPJPD Kabupaten OKU. Penelitian operasional (*Operational Riset*) dan penelitian kebijakan menjadi kebutuhan untuk kegiatan litbang mendatang.
- d. Keterbatasan sarana dapat dipenuhi melalui pengadaan peralatan yang dibutuhkan untuk kegiatan litbang. Pemendagri Nomor 33 tahun 2007 mengatur tentang hal ini. Dengan demikian, kebutuhan sarana litbang dapat menjadi bagian dari pembiayaan kegiatan untuk pembelian alat dan bahan (pasal 17). Pembuatan website secara khusus untuk Badan Litbang mendesak untuk dibuat dan disiakan untuk sumberdaya manusia pengelola.
- e. Respon positif dari stakeholder menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Badan Litbang. Respon positif akan semakin positif dan percaya jika Badan Litbang mampu memenuhi harapan pengguna hasil litbang. Tetapi kondisinya akan sebaliknya jika yang terjadi sebaliknya.



## JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

Nama Penulis: Syahri, Supardi

### DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Calam dan Amnah Qurniati, 2016, *Merumuskan Visi dan Misi Lembaga Pendidikan*, Bengkulu: Jurnal SAINTIKOM Vol.15, No. 1, Januari 2016.

Bambang Irawan, 2016, *Kapasitas Organisasi dan Pelayanan Publik*, Jakarta: Publika Press.

Deputi Bidang Kelembagaan Iptek Kementerian Riset dan Teknologi, 2011. *Peta Kemampuan Litbang dan Kemampuan Desiminasi Lembaga Litbang Pemerintah: Hasil Survei Penelitian dan Pengembangan di Sektor Pemerintah tahun 2011*.

Direktorat Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bappenas, 2011. *Mengukur Kompetensi Unit Riset*.

Eade, D., 1998, *Capacity Building: an approach to People Centered Development* Oxford UK, Oxfam GB.

Fauzan, Haris. 2011. *Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah sebagai Agenda Optimsi Pengelolaan Daerah Perbatasan*. Lembaga Administrasi Negara. Jakarta.

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2008. *Rekomendasi Kebijakan Penataan Kelembagaan Organisasi Pemerintah Daerah*. Direktorat Otonomi Daerah Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah: Jakarta.

Lakitan, Benyamin. 2012. *Penguatan Kapasitas Lembaga Litbang: Strategi untuk Indonesia. Makalah Keynote Speech pada Stakeholders' Meeting II Lembaga Administrasi Negara (LAN)*, Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Bidang Administrasi Negara, Jakarta 27-28 November 2012

Mahfud, Ali Zuhri, *Peran dan Koordinasi Stakeholder dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar*, Malang: Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 3, No. 12,

Moeleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya



## JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

Nama Penulis: Syahri, Supardi

Nugraha. 2004. Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Artikel dalam Jurnal Ilmu Administrasi No. 1 Volume 3 tahun 2004*, hal 184-195.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Pratama, Ardie dkk. 2012. *Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Dalam Koordinasi Pelayanan Perizinan di BPPT Kota Semarang*. Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

Ratnasari, Junivia Dwi dkk. 2012. Pengembangan Kapasitas (*Capacity Builing*) Kelembagaan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol 1, No. 3. Hal 103-110.

Siagian, Sondang P.2004. *Teori Pengembangan Organisasi (Cetakan Kelima)*: Bumi Aksara. Bandung.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: PT Alfabeta.

Wisnu, Dicky UR dan Siti Nurhasah, 2005. *Teori Organisasi, Struktur dan Disain*. Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.

<https://litbang.kemendagri.go.id/website/litbang-dan-peranannya-terhadap-daerah/>

<https://bapelitbangda.okukab.go.id/>